

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesantren dapat dianggap sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang paling tua di Indonesia dari segi sejarah. Keberadaan pesantren muncul bersamaan dengan proses penyebaran Islam di Nusantara pada abad ke-18 dan ke-19 Masehi, dan terus berkembang hingga sekarang. Kemampuan pesantren dalam menghadapi perkembangan zaman menunjukkan bahwa sistem pendidikan ini mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Hal ini telah menumbuhkan kepercayaan dan harapan di kalangan masyarakat. Saat ini dan di masa depan, pesantren dapat berfungsi sebagai lembaga pendidikan alternatif serta sebagai penggerak dan penjaga perubahan sosial. (M Muin A, 2007).

Pesantren sejak lama telah memahami bahwa pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan tanggung jawab tidak hanya pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga pesantren itu sendiri. Karena itu, pesantren yang telah memiliki sejarah panjang dalam pembinaan dan pengembangan SDM seharusnya terus didorong dan ditingkatkan kualitasnya, salah satunya dengan mendirikan lembaga pendidikan formal yang tetap berada di bawah naungan pondok pesantren. (M. D. Yahya, 2017).

Pengembangan pesantren memerlukan perhatian dan dukungan yang serius dari pemerintah, yang harus terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Mengoptimalkan peran pesantren dalam proses pembangunan adalah langkah penting untuk kemajuan pendidikan. Dalam situasi bangsa yang tengah menghadapi krisis moral saat ini, pesantren sebagai lembaga pendidikan yang menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai moral harus menjadi pelopor dan sumber inspirasi dalam reformasi gerakan moral bangsa. Dengan demikian, pembangunan akan lebih berarti dan penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan. (A. Haris, 2017).

Penguatan sistem akuntabilitas pondok pesantren kini menjadi perhatian utama seiring dengan pengesahan berbagai peraturan yang mempengaruhi mereka, seperti UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Selain itu, buku pedoman

akuntansi pondok pesantren yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia mulai diterapkan sejak Mei 2018. Perubahan ini diharapkan akan meningkatkan akuntabilitas publik pondok pesantren. Standar akuntansi yang berlaku untuk pondok pesantren meliputi PSAK 45, SAK ETAP, dan SAK Syariah. Meskipun pondok pesantren telah menunjukkan kontribusinya, mereka masih menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal, khususnya terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia yang menangani keuangan pondok pesantren.

Penelitian oleh Arifin, Zaenal, dan Riharjo (2014), Nikmatuninayah (2014), Zamzani dan Najib (2015), serta Andarsari dan Pipit Rosita (2016) menunjukkan bahwa pondok pesantren belum sepenuhnya mengimplementasikan standar akuntansi yang diharapkan. Dalam laporan pertanggungjawaban keuangan pondok pesantren, laporan yang disajikan hanya mencakup pengeluaran kas dan penerimaan kas. Yayasan hanya menyediakan laporan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas, yang tidak sesuai dengan klasifikasi pos-pos yang ditetapkan dalam standar akuntansi keuangan karena Yayasan belum memahami standar akuntansi yang seharusnya menjadi pedoman pelaporan keuangan untuk entitas nirlaba.

Penelitian yang dilakukan oleh Larasati, Artina, dan Africano (2013) mengenai sistem akuntansi kas masuk dan keluar di yayasan menunjukkan bahwa sistem yang ada masih kurang efektif, karena beberapa bagian dari sistem tersebut memerlukan perbaikan. Oleh karena itu, dibutuhkan pedoman khusus yang dapat digunakan oleh pondok pesantren dalam menyusun laporan keuangan untuk meningkatkan akuntabilitas. Kebutuhan akan pedoman ini timbul karena penyusunan laporan keuangan di pondok pesantren memerlukan lebih dari satu standar, yang dapat membingungkan pengelola dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel.

Sebagai lembaga pendidikan, pesantren memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Untuk memahami tujuan pendidikan pesantren, penting untuk mengenali elemen-elemen yang ada dalam pesantren tersebut. Keberhasilan pesantren dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dari kelengkapan elemen yang dimilikinya.

Menurut Zamakhsyari Dhofier, terdapat lima unsur utama yang membentuk elemen pesantren, yaitu pondok, masjid, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, santri, dan kiyai (Zamakhsyari Dhofier, 2009).

Secara umum, tujuan dari organisasi yang dikelola oleh lembaga pendidikan dapat dikategorikan menjadi dua jenis: orientasi laba (bisnis) dan non-laba. Ini berlaku baik untuk lembaga pendidikan swasta maupun yang dikelola oleh pemerintah, seperti sekolah negeri. Namun, akuntansi tidak terbatas pada praktik bisnis saja ia juga diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan lainnya, termasuk pencatatan, penjurnalan, dan perhitungan anggaran dalam sistem akuntansi. (Wahyuningsih dkk, 2018).

Tingkat kemandirian keuangan Pondok Pesantren dapat diukur dengan membandingkan total sumbangan yang diterima dengan pendapatan yang dihasilkan dari aset-aset yang dimiliki. Apabila pendapatan dari aset-aset Pondok Pesantren melebihi jumlah sumbangan dan bantuan eksternal, maka dapat disimpulkan bahwa Pondok Pesantren tersebut memiliki kemampuan untuk membiayai kebutuhannya secara mandiri. (Rendri Pratama Wp & Muhammad Nafik HR, 2016).

Pedoman Akuntansi Pesantren memiliki peranan krusial dalam membantu penyusunan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi bagi para pengguna laporan tersebut. Selain itu, pedoman ini menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun dengan konsisten dan tidak bervariasi.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, peneliti merasa terdorong untuk meneliti penerapan akuntansi pesantren. Hal ini dikarenakan penerapan akuntansi pesantren yang efektif dan benar dapat menghasilkan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP yang dikeluarkan oleh IAI dan BI. Penelitian ini diberi judul **“Analisis Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren Pada Pondok Pesantren Hikmatul Uluum As-Syarifuddin Tasikmalaya”**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan akuntansi pesantren di Pondok Pesantren Hikmatul Uluum As-Syarifuddin Tasikmalaya?
2. Bagaimana kesesuaian akuntansi pesantren di Pondok Pesantren Hikmatul Uluum As-Syarifuddin Tasikmalaya dengan pedoman akuntansi pesantren?
3. Faktor – faktor apa yang menyebabkan Pondok Pesantren Hiikmatul Uluum As-Syarifuddin Tasikmalaya belum menerapkan Pedoman Akuntansi Pesantren?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dikaji tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi di Pondok Pesantren Himatul Uluum As-Syarifuddin Tasikmalaya
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pesantren di pondok pesantren Hikmatul Uluum As-Syarifuddin Tasikmalaya dengan pedoman akuntansi pondok pesantren
3. Untuk Mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan Pondok Pesantren Hikmatul Uluum As-Syarifuddin Tasikmalaya belum menerapkan Pedoman Akuntansi Pesantren.

D. Manfaat Penelitian

Sementara itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat atau kegunaan, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang akuntansi syariah, khususnya terkait dengan Pedoman Akuntansi Pesantren. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang mempelajari Pedoman Akuntansi Pesantren.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pengalaman secara praktis, serta memberikan contoh yang berguna bagi peneliti untuk pembelajaran di masa depan. Selain itu, hasil penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

b. Bagi pesantren

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi landasan dalam penyajian dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan pedoman akuntansi pesantren, sehingga dapat mendukung kemajuan pelaporan keuangan di pesantren tersebut.

